

# **Penerapan Nilai-nilai Ekonomi Pancasila dalam Percepatan Ekonomi Inklusif di Era Society 5.0**

*(The Application of Pancasila Economic Value in Acceleration of Economic  
Inclusion toward Society 5.0)*

Oleh:

**Siti Awaliyati Deliabilda; Vina Marlisa; Finda Selli Anditya; Tunggu Ariana; Sunita  
Dasman**

Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa

[sadeliabilda@gmail.com](mailto:sadeliabilda@gmail.com); [vmarlisa1606@gmail.com](mailto:vmarlisa1606@gmail.com); [findasellianditya@gmail.com](mailto:findasellianditya@gmail.com);

[antunggu@gmail.com](mailto:antunggu@gmail.com); [sunita.dasman@pelitabangsa.ac.id](mailto:sunita.dasman@pelitabangsa.ac.id)

## **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai posisi Pancasila dalam perencanaan ekonomi inklusif di Indonesia, mengukur kinerja dan pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai tindakan korektif dan strategi percepatan pencapaian ekonomi inklusif di era Society 5.0. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka yang berasal dari buku, laporan, jurnal, dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi inklusif ini sejalan dengan nilai Pancasila. Ketiga pilar dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sudah dalam kategori memuaskan tetapi perlu waktu dan upaya untuk mencapai kategori sangat memuaskan. Peluang adanya Era Society 5.0, yaitu mempercepat berkurangnya ketimpangan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tantangan Era Society 5.0, yakni infrastruktur yang belum merata, jumlah pengangguran, dan bonus demografi. Nilai Pancasila yang dapat diterapkan, yaitu melakukan sistem pengelolaan keuangan yang baik; tidak terjadi pemerasan dan eksploitasi tenaga kerja serta terstandarisasinya pemberian upah; adanya kolaborasi seluruh stakeholder; mengutamakan hajat hidup orang banyak; serta mengutamakan percepatan pembangunan infrastruktur, memperluas akses pendidikan, pemerataan akses kesehatan, terbukanya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan tanpa memandang gender, dan adanya pemberdayaan bagi para perempuan yang belum bekerja.*

### **Kata kunci:**

*Ekonomi Pancasila, evaluasi kinerja, ekonomi inklusif, era Society 5.0*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to assess the position of Pancasila in inclusive economic planning in Indonesia, measure the performance and achievement of the Inclusive Economic Development Index in Indonesia, and apply the values of Pancasila as a corrective action and strategy to accelerate the achievement of an inclusive economy in the Society 5.0 era. The research method used is literature review derived from books, reports, journals, and other relevant sources. The results of the study show that this inclusive economy is in line with the values of Pancasila. The three pillars in the Inclusive Economic Development Index are already in the satisfactory category but need time and effort to reach the very satisfactory category. Opportunities for Era Society 5.0, namely accelerating the reduction of inequality and improving the quality of people's lives. The challenges of Era Society 5.0, namely infrastructure that is not evenly distributed, the number of unemployed, and demographic bonuses. Pancasila values that can be applied are implementing a good financial management system; there is*

*no extortion and exploitation of labor and standardization of wages; the collaboration of all stakeholders; prioritize the lives of many people; and prioritizing the acceleration of infrastructure development, expanding access to education, equitable access to health, opening equal opportunities to access education and employment regardless of gender, and empowering women who have not worked.*

### Keywords:

*Pancasila Economy, performance evaluation, inclusive economy, Society 5.0 era*

## Pendahuluan

Pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, yaitu ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan (Warsilah, 2015). Sejak tahun 2006, jumlah persentase kemiskinan di Indonesia cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Tercatat bahwa di tahun 2006 berada di angka 17,75% dan di tahun 2018 berada di angka 9,82% (BPS, 2018). Menariknya, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun mampu menurunkan persentase jumlah kemiskinan dan pengangguran, saat ini masih terjadi kesenjangan yang tinggi. (Dyah Hapsari et al., 2018)

Data Global Wealth Report dari Credit Issue (2018) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling timpang di dunia. Dalam hal pengeluaran perkapita, persentase terbesar trennya menunjukkan masih dinikmati oleh kelompok 20% pengeluaran tertinggi. Adapun kelompok 40% terendah hanya mendapatkan 20% pengeluaran sejak tahun 2005 (BPS, 2019).



Sumber: BPS, 2019

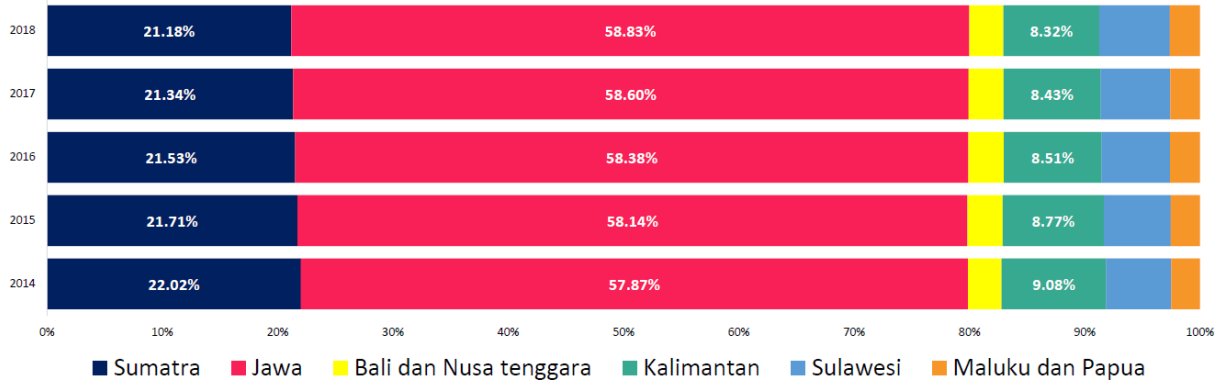
Gambar 1.

### Distribusi Pengeluaran Perkapita dan Rasio Antara Kelompok Pengeluaran, 2004-2018

Hal ini juga didukung berdasarkan hasil survei Oxfam (2017) yang menyebutkan bahwa harta total empat orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Selain itu, nilai kekayaan empat orang terkaya di Indonesia lebih tinggi dibandingkan total kekayaan 40% penduduk miskin. Melihat klasifikasi kemiskinan antara kemiskinan di kota dan desa, diketahui bahwa penurunan di kota selama lima tahun terakhir turun sebanyak 1,37% dari 8,39% menjadi 7,26%. Persentase ini setara dengan 3,62 juta jiwa. Sedangkan penurunan kemiskinan di desa baru 0,97% atau setara 2,56 juta jiwa (BPS, 2018). Data ini mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan di desa belum berjalan maksimal.

Distribusi PDB-pun masih terjadi ketimpangan di mana sekitar 58% masih terpusat di Pulau Jawa dan disusul Pulau Sumatera dengan persentase 22%. Hal ini tidak berubah selama

setidaknya 5 tahun terakhir. Selain itu, perekonomian Indonesia juga masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan jumlah sekitar 80%. Sekitar 20% sisanya berasal dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Bappenas, 2019).



Sumber: Bappenas, 2019

Gambar 2.  
 Distribusi PDB berdasarkan Pulau 2014-2018

Pada tahun 2020, jumlah pengangguran dan kemiskinan juga meningkat. Hal ini didorong dengan terjadinya pandemik COVID-19 yang juga mengakibatkan semakin memburuknya kesejahteraan masyarakat. Pembatasan sosial yang dijalankan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 juga membatasi ruang gerak dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 7,33% di tahun 2020 dari sebelumnya 5,28% di tahun 2019 dan tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,9% di tahun 2020 dari sebelumnya 9,41% di tahun 2019. Angka kemiskinan juga meningkat dari 24,79juta di September 2017 dan meningkat menjadi 26,42juta di Maret 2020. Berikut adalah grafik tingkat pengangguran dan kemiskinan sejak 2014 hingga 2020.(Kementerian Keuangan, 2020).



Sumber: BPS, 2020

Gambar 3.  
 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2014 s.d. 2019

Selama 20 tahun terakhir, Indonesia merupakan negara yang kesenjangan antara kaum superkaya dengan penduduk lainnya tumbuh paling cepat dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya (Oxfam, 2017). Tingginya ketimpangan dalam masyarakat dapat terjadi karena adanya

ketimpangan dalam usaha, kerja keras, dan talenta individu; ketimpangan dalam kesempatan; serta kebijakan. Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar ini menjadi pertanda bahwa salah satu butir Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak diimplementasikan dengan baik. Padahal Sistem Ekonomi Pancasila telah menjadi ideologi bangsa Indonesia.

Visi dari Sistem Ekonomi Pancasila sendiri adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum yang dimaksud adalah kemakmuran bersama seluruh rakyat serta kemandirian bangsa untuk menjamin keberlanjutan terwujudnya kesejahteraan umum. Adapun kemakmuran yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan nonmateri. Kebutuhan nonmateri antara lain kebutuhan jiwa, kebutuhan spiritual, serta kesempurnaan akal (Ismail, 2014). Sedangkan kemandirian bangsa merupakan kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat bermitra dengan bangsa lain.

Berdasarkan hasil The Inclusive Development Index (IDI) (2018) kepada negara-negara yang tergabung di World Economic Forum, secara keseluruhan ekonomi inklusif Indonesia berada di posisi ke-36 di antara negara-negara berkembang dengan nilai 3,95. Nilai ini menandakan bahwa tingkat inklusivitas Indonesia tidak memuaskan. Posisi dan nilai ini lebih rendah dibanding Malaysia dan Thailand negara yang memiliki nilai inklusivitas tertinggi adalah Norwegia dengan nilai 6,08. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif juga diterapkan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian untuk mengurangi ketimpangan yang semakin melebar.

Selain permasalahan ketimpangan, Indonesia juga dihadapkan dengan industri yang terus berkembang. Setelah munculnya revolusi industri 4.0, saat ini dunia sudah mulai menghadapi revolusi industri society 5.0. Di revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi meningkat pesat akan tetapi peran masyarakat semakin berkurang. Industri 4.0 adalah eranya menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan manusia. (Lena Ellitan, Lina Anatan, 2020; Puspita et al., 2020) Sedangkan dengan Society 5.0 diharapkan dapat tercipta nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih yang dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. (Shiroishi et al., 2018)

Beberapa penelitian sebelumnya memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi negara, terutama Indonesia, akan semakin terdorong oleh perkembangan teknologi digital (Das et al, 2016). Ekonomi digital dianggap mampu menjembatani dan mengurangi angka ketimpangan yang saat ini masih menjadi tantangan. Sayangnya, hasil penelitian menemukan bahwa dilihat dari wilayah, gender, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan sektor usaha, kesiapan infrastruktur masih kurang dan belum merata. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, perkembangan teknologi ini bisa menjadi boomerang dan memperlebar ketimpangan yang telah terjadi.

Pemerintah Indonesia saat ini masih fokus dalam program industri 4.0 di mana salah satu upayanya adalah dengan membuat roadmap Making Indonesia 4.0. Indonesia menargetkan pencapaian ekspor netto 100 persen dari PDB tahun 2030 ("Mak. Indones.," 2019; Wibisono et al., 2020). Sektor utama yang menjadi fokus pemerintah adalah makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik. Kelima sektor ini dipilih berdasarkan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Sektor-sektor ini juga dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global.

Akan tetapi, keberhasilan implementasi Making Indonesia 4.0 harus juga sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mampu menekan angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan ekonomi serta bisa merasakan manfaat yang sama dari pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan program Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di mana pemerintah menargetkan agar disparitas atau kesenjangan yang terjadi di masyarakat dapat semakin dipersempit. Pencapaian target dari implementasi kolaborasi dua program ini dapat didorong antara lain dengan pemerataan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi kreatif, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pertumbuhan ekonomi inklusif sulit dicapai jika tidak diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat 1,25% dari tahun 2010 hingga 2020. Sebanyak 70,72% di antaranya merupakan usia produktif dengan kisaran usia 15 hingga 64 tahun (Bappenas, 2019).

Ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan yang kondusif untuk meningkatkan ukuran dan kemampuan ekonomi kelas menengah (Birdsall, 2007). Pertumbuhan ekonomi dapat disebut inklusif apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Syarat penting terciptanya pertumbuhan inklusif adalah disparitas pendapatan pekerja di sektor pertanian dan nonpertanian tidak terlalu besar (Sen, 2007).

Pengukuran ekonomi inklusif berdasarkan pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Setiap tahunnya, indeks ini digunakan untuk mengukur dan memantau sejauhmana tingkat inklusivitas ekonomi di 103 negara yang tergabung dalam World Economic Forum (weforum.org). di Indonesia, penilaian ini dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (inklusi.bappenas.go.id). Terdapat tiga pilar, delapan subpilar, serta 21 indikator pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang digunakan di Indonesia, yaitu:

- PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
- Subpilar 1.1 : Pertumbuhan ekonomi
  - Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat
- Indikator : 1. Pertumbuhan PDRB riil per kapita  
 2. Share manufaktur terhadap PDRB  
 3. Rasio kredit perbankan terhadap PDRB Nominal
- Subpilar 1.2 : Kesempatan kerja
  - Demografi ketenagakerjaan menjadi salah satu hal kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, semakin meningkat pula pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi.
- Indikator : 1. Tingkat kesempatan kerja  
 2. Presentase penduduk bekerja penuh  
 3. Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas
- Subpilar 1.3 : Infrastruktur ekonomi
  - Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses oleh masyarakat luas. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat pendukung yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi.
- Indikator : 1. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN  
 2. Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam  
 3. Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

**PILAR 2 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan****Subpilar 2.1 : Ketimpangan**

Ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah.

- Indikator** : 1. Rasio pendapatan gini  
2. Sumbangan pendapatan perempuan  
3. Rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota

**Subpilar 2.2 : Kemiskinan**

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan.

- Indikator** : 1. Persentase penduduk miskin  
2. rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

**PILAR 3 : Perluasan Akses dan Kesempatan**

**Subpilar 3.1** : Hal ini ditandai dengan sumber daya manusia berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

- Indikator** : 1. Angka harapan lama sekolah  
2. Persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap  
3. Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan

**Subpilar 3.2 : Infrastruktur Dasar**

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata. Hal ini juga memudahkan kelompok masyarakat yang relative tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan.

- Indikator** : 1. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak  
2. persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri

**Subpilar 3.3 : Keuangan Inklusif**

Akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas dapat memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

- Indikator** : 1. Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif  
2. Rasio kredit perbankan UMKM

Penilaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia menggunakan skala 1 s.d. 10 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Kategori Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia**

<b>Nilai Indeks</b>	<b>Kategori</b>
1 – 3	Tidak memuaskan
4 – 7	Memuaskan
8 - 10	Sangat memuaskan

Sumber: Bappenas (2019)

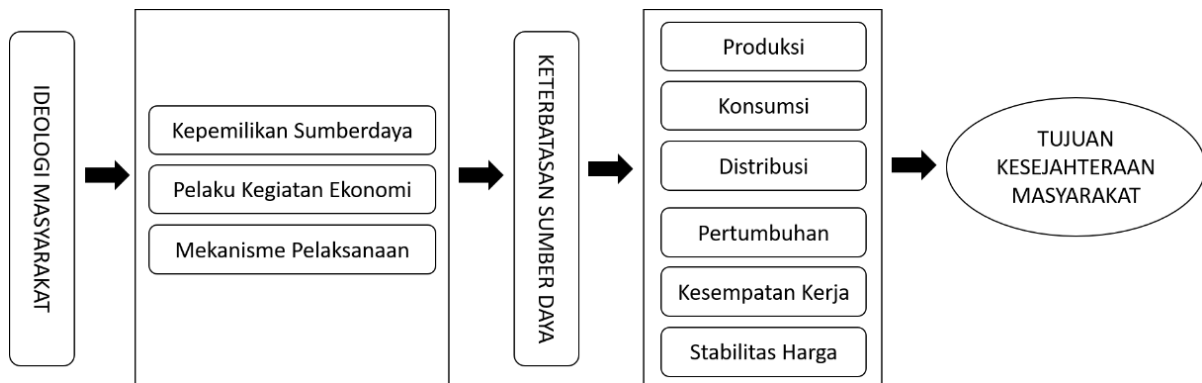
Rentang kategori penilaian ini berbeda dengan yang digunakan oleh World Economic Forum yang menggunakan skala 1 s.d. 7. Nilai 1 berarti terburuk dan nilai 7 berarti terbaik (World Economic Forum, 2018).

#### Sistem Ekonomi Pancasila

Pancasila merupakan dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (leitsar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan (Latif, 2011). Hakikat keberadaan Pancasila merupakan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain maupun hasil pemikiran seseorang ataupun beberapa orang (Tjakrawedaja, et al, 2019). Pancasila diartikan Swasono (2010) sebagai sikap budaya masyarakat Indonesia, ideologi, serta sistem kehidupan ekonomi berikut dengan teknologinya dan memandang manusia Indonesia sebagai kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh berarti mampu berpikir, bertindak, dan berbuat berdasarkan rangsangan ekonomi, faktor sosial, dan juga moral. Hal tersebut terurai dalam seluruh asas Pancasila sebagai berikut.

1. Sila pertama, Ketuhanan Yangmahaesa  
Sila ini menjadi dasar keyakinan religius masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan integral dalam totalitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab  
Sila ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak individu yang selalu diselaraskan dengan hak masyarakat dan hak negara sehingga tercipta kehidupan bangsa yang adil dan beradab.
3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia  
Sila ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia disatukan berdasarkan paham kekeluargaan dan mengejawantahkan persatuan dalam keragaman, serta keragaman dalam persatuan.
4. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan  
Sila ini menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan seluruh rakyat Indonesia dan dilakukan musyawarah serta akal sehat sesuai dengan hati nurani untuk mencapai mufakat.
5. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia  
Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya kehidupan yang selaras antarwarganya, antara peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta selaras antara hak politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Latif, 2011).

Sistem Ekonomi menurut Ismail et al (2014) adalah tatanan mengenai pemanfaatan semua sumber daya (komponen sumber daya oleh seluruh partisipan (komponen pelaku/agen) melalui mekanisme tertentu (komponen penyelenggara) untuk mencapai tujuan yang diinginkan (komponen tujuan). Sistem ekonomi merupakan sistem yang bekerja di bidang ekonomi dan terkait erat dengan kebudayaan, adat istiadat, dan ideologi yang dianut masyarakatnya. Tujuan dari sistem ekonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mengimplementasikan elemen sistem ekonomi, yaitu unsur sumber daya, pelaku ekonomi, dan proses penyelenggaraan kegiatan ekonomi (Tjakrawedaja; et al, 2019). Berikut adalah susunan sistem ekonomi:



Gambar 4

Susunan Sistem Ekonomi Sumber: (Tjakrawedaja; et al, 2019)

Menurut Lampert (1994) dalam Ismail et al (2014), sistem ekonomi setidaknya memiliki tiga peran dan fungsi dalam ekonomi. Pertama, menjadi pedoman pengarah bagaimana seharusnya ekonomi dijalankan. Kedua, mengkoordinasikan bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan. Terakhir, menjaga keserasian antara efisiensi dan keadilan.

Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan pandangan Bung Hatta, didefinisikan sebagai tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, visi dari Sistem Ekonomi Pancasila adalah terwujudnya kesejahteraan umum di mana kebutuhan materi dan nonmateri seluruh rakyat terpenuhi. Peranan negara dalam melaksanakan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia tercantum dalam Ayat (2) Pasal 27 serta Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut mengamanatkan bahwa negara berperan dalam:

1. Menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya sehingga seluruh rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan menikmati hasilnya.
2. Membuat kebijakan ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya untuk kemakmuran seluruh rakyat dengan adanya peningkatan pendapatan sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang memadai.
3. Negara melaksanakan program pelayanan kepada keluarga yang sangat miskin dan tidak sanggup bekerja secara produktif, terutama di sektor Pendidikan dan Kesehatan melalui instrument fiskal. Negara juga harus melakukan penguatan usaha ekonomi rakyat seperti pemberian subsidi, insentif pajak, serta pembuatan sarana dan prasarana yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti irigasi dan jalan.
4. Membentuk serta memperkuat BUMN untuk menjaga stabilitas serta terwujudnya pemerataan ekonomi nasional.
5. Menjaga lingkungan hidup yang nyaman dan lestari bagi rakyat.

Ciri Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto (1987) dalam Tjakrawedaja; et al (2019) bahwa ekonomi Pancasila memiliki lima ciri, yaitu :

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan;
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tanggung di mana nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi;
4. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha Bersama;

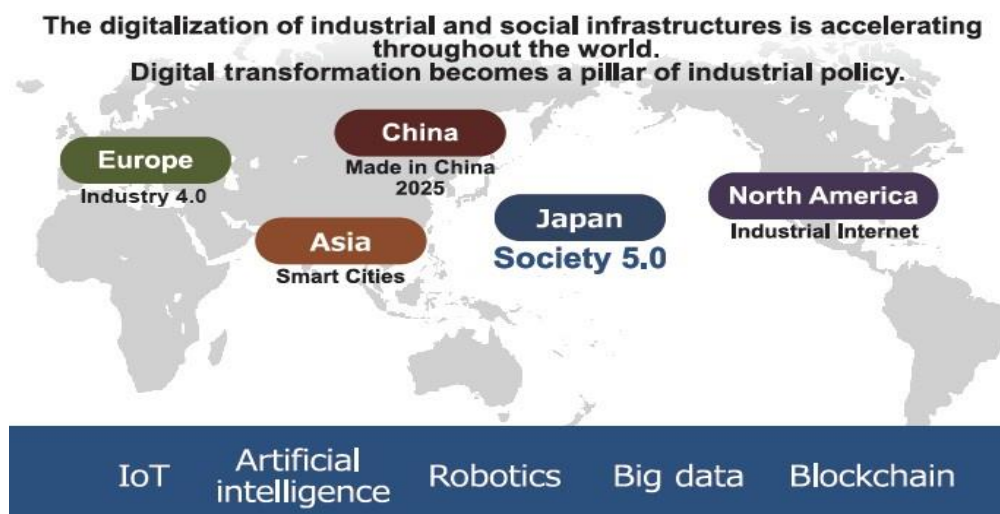
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Ciri-ciri ekonomi Pancasila menurut Boediono (2009) terdiri dari:

1. Adanya peranan dominan dari koperasi, bersama dengan perusahaan negara dan swasta di mana semua bentuk badan usaha didasarkan kepada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni, bukan pada asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan.
2. Memandang manusia secara utuh sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi.
3. Adanya keinginan yang kuat ke arah egalitarianism dan pemerataan sosial.
4. Diberikan terciptanya penyusunan perekonomian nasional yang tangguh untuk mencapai perekonomian yang mandiri, terhormat di kancah internasional, serta didasarkan pada solidaritas dan harmonisasi dalam negeri.
5. Mengandalkan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi diimbangi perencanaan yang kuat.

Transformasi revolusi industri dimulai dari tahun 1780 di mana produksi industri dengan mesin uap mulai digunakan sebagai pengembangan dari proses manual. Selanjutnya pada revolusi industri 2.0 dimulai tahun 1870 di mana diadakan produksi massal dengan assembly lines untuk memudahkan proses transportasi saat memproduksi suatu barang. Pada revolusi industri 3.0, pekerjaan manusia mulai digantikan oleh robot atau mesin. Di era ini, produksi sudah menggunakan computer dan elektronik. Saat ini, dunia sedang berada di revolusi industri 4.0 di mana penggunaan perangkat saling terhubung, mulai digunakannya artificial intelligence, Internet of Things, dan penyimpanan data di cloud. Di era ini, manusia memiliki akses terhadap teknologi.

Sejak 2017 Perdana Menteri Jepang mengusulkan society 5.0, yaitu konsep di mana adanya integrasi antara dunia nyata dan dunia maya dan teknologi hadir untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 menciptakan nilai-nilai baru dengan mengkolaborasi beberapa sistem yang berbeda dan merencanakan standardisasi format data, model, dan arsitektur sistem. Untuk itu kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan dan dikembangkan. (Hayashi, et al, 2017). Perkembangan transformasi digital dunia digambarkan sebagai berikut.



Sumber : Fukuyama, 2018

Gambar 5  
 Transformasi Digital

Society 5.0 merupakan solusi atas kekhawatiran yang timbul dari adanya Revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 dianggap berfokus pada penggunaan mesin-mesin berteknologi canggih yang menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan tenaga manusia. Sedangkan tujuan dari society 5.0 adalah untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana pembangunan ekonomi dan penyelesaian tantangan sosial tercapai. Masyarakat pun dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi dengan nyaman dan aktif.

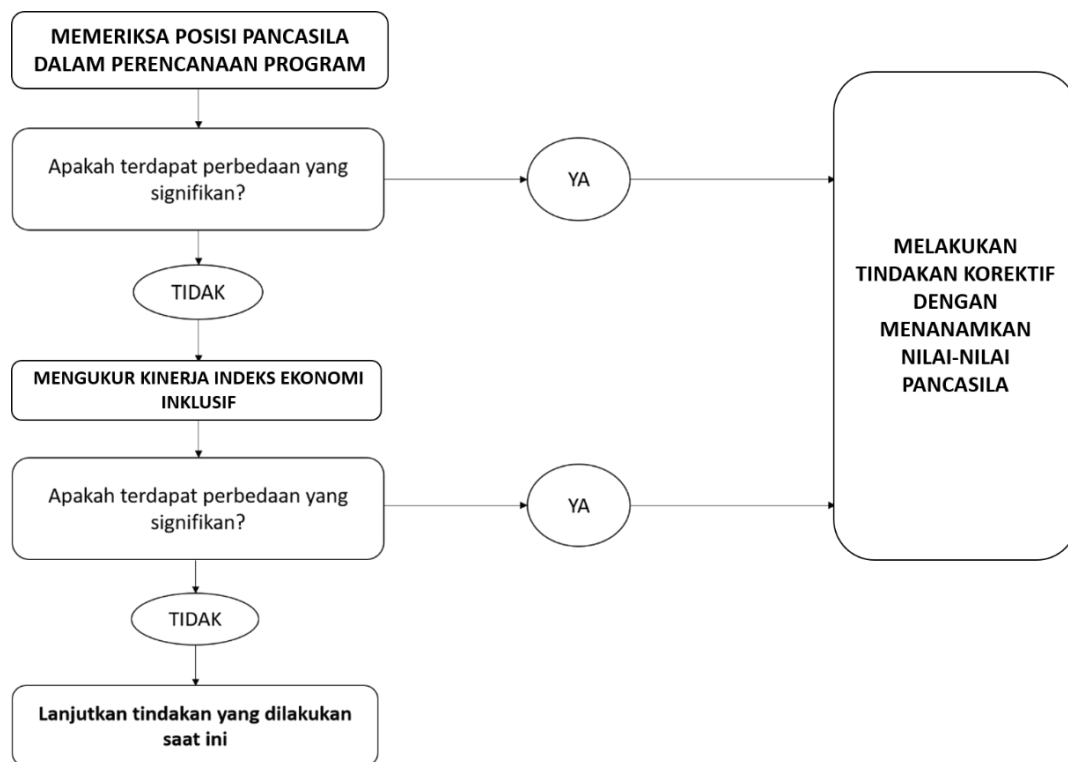
Society 5.0 ini merupakan masyarakat yang menyediakan barang serta layanan yang diperlukan dengan memperhatikan secara detail berbagai kebutuhan manusia, terlepas dari wilayah, usia, jenis kelamin, bahasa, dan hal lainnya. Konsep Society 5.0 ini adalah mengembangkan kerangka kerja dan teknologi yang dikembangkan untuk menyelesaikan tantangan masyarakat di seluruh dunia. Keberadaan Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru yang dapat mengurangi kesenjangan antara manusia dan masalah ekonomi ke depannya melalui perkembangan teknologi. Perbedaan desain, tujuan, ruang lingkup, dan fokus dari industri 4.0 dengan Society 5.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Perbandingan Industri 4.0 dan Society 5.0

Perbandingan	Industri 4.0 (Jerman)	Society 5.0 (Jepang)
Desain	Rencana Kerja Jerman dengan Strategi Berteknologi Tinggi 2020 Direkomendasikan untuk implementasi inisiasi strategi Industri 4.0	Rencana dasar sains dan teknologi ke-5 Strategi sains, teknologi, dan inovasi secara komprehensif 2017
Tujuan & Lingkup	<i>Smart factories</i> Fokus kepada manufaktur	<i>Super-smart society</i> Masyarakat sebagai pribadi utuh
Fokus Utama	<i>Cyber-physical systems (CPS)</i> <i>Internet of Things Mass customization</i>	Integrasi tingkat tinggi antaradunia nyata dan dunia maya Menyeimbangkan perkembangan ekonomidengan menyelesaikan isu sosial Manusia sebagai pusat masyarakat

Sumber: Ferreira & Serpa, 2018

Kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dan modifikasi dari teori evaluasi strategi yang dikemukakan oleh Fred & David (2017) serta Sistem Ekonomi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia (Swasono, 2010; Tjakrawedaja; et al, 2019). Kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Fred & David (2017), Swasono (2010), Tjakrawedaja; et al, (2019)

Gambar 6  
Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan menilai posisi Pancasila dalam perencanaan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia, mengukur kinerja dan pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia di era Society 5.0, serta penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai tindakan korektif dan strategi percepatan pencapaian indeks pembangunan ekonomi inklusif di era Society 5.0. Pertanyaan penelitian yang dibangun adalah:

1. Apakah Pancasila digunakan sebagai dasar dalam perencanaan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia?
2. Bagaimana kinerja dan pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia di era Society 5.0?
3. Bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan sebagai Tindakan korektif dan strategi percepatan pencapaian indeks pembangunan ekonomi inklusif di era Society 5.0?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Kajian pustaka merupakan penelitian yang mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang berorientasi akademik serta merumuskan kontribusi teoritis serta metodologinya untuk topik tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif di mana data yang telah diperoleh akan diuraikan secara teratur dan diberi pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data penelitian terdahulu serta laporan pemerintah terkait topik yang dipilih yang kemudian dianalisis menggunakan teori dari berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya.

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan rumusan masalah. Pencarian data-data sekunder menggunakan kata kunci yang dipilih, yaitu ekonomi inklusif, Sistem Ekonomi Pancasila, dan era society 5.0. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Data yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja dan pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia dibatasi pada rentang tahun 2011 hingga 2019.

## Hasil Penelitian

### A. Posisi Pancasila sebagai Dasar Perencanaan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia bertujuan berfokus pada tiga pilar, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Indikator dari setiap pilar tersebut sudah sejalan dengan tujuan dari Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu terwujudnya kesejahteraan umum di mana kebutuhan materi dan nonmateri seluruh rakyat terpenuhi.

Ekonomi inklusif juga merupakan bentuk implementasi dari Sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan pertama adalah memperluas akses masyarakat terhadap program yang dapat meningkatkan kualitas SDM, baik di desa maupun di kota, terutama akses pendidikan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Akita (2017) yang menyatakan bahwa perbedaan modal pendidikan dasar berpengaruh paling signifikan dalam kesenjangan antara masyarakat di desa dan kota. Akses Pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kemampuan kerja, pengetahuan, dan informasi nantinya dapat mempengaruhi produktivitas kerja, dampaknya adalah pendapatanpun akan timpang (Castello & Domenech, 2002).

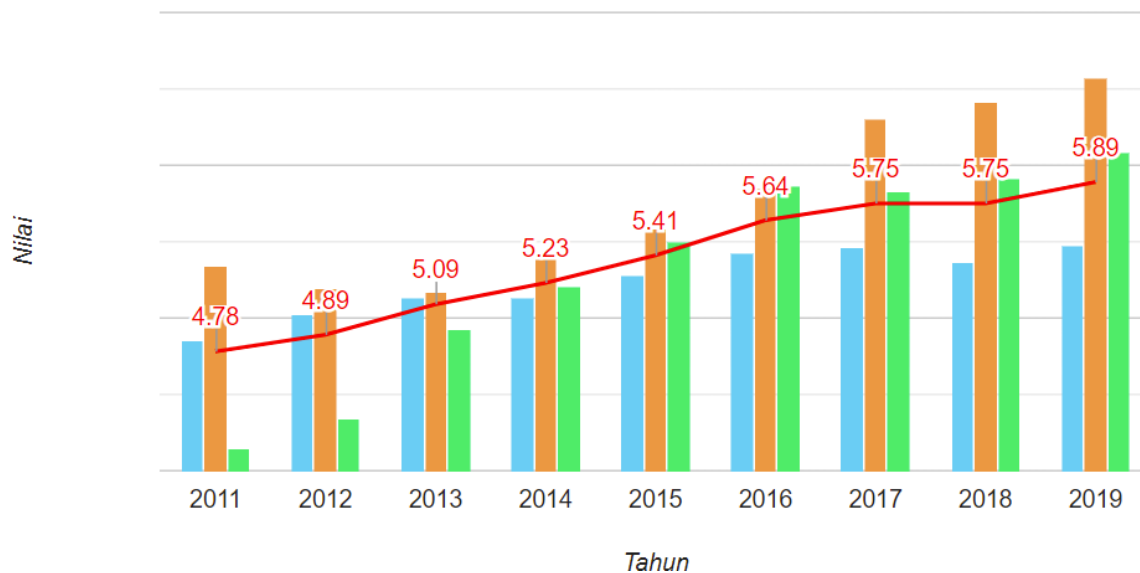
Keadilan kedua yang perlu menjadi fokus berikutnya adalah keadilan dalam infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat membuka peluang bagi kelompok berpendapatan rendah untuk mengakses asset-aset produktif sehingga terjadi peningkatan nilai modal mereka (Charlery, et al, 2016). Keberadaan infrastruktur dapat meningkatkan modal manusia. Telekomunikasi, listrik, jalan, air bersih, dan sanitari, berperan dalam pengintegrasikan individu dan rumah tangga ke dalam kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk pemanfaatan layanan dasar seperti Kesehatan dan Pendidikan juga merupakan bagian dari infrastruktur juga (Freenati et al, 2003).

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang yang tercantum dalam Ayat (2) Pasal 27 serta Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 di mana negara berperan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya yang ditunjukkan dengan:

1. Menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya sehingga seluruh rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan menikmati hasilnya.
2. Membuat kebijakan ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya untuk kemakmuran seluruh rakyat dengan adanya peningkatan pendapatan sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang memadai.
3. Negara melaksanakan program pelayanan kepada keluarga yang sangat miskin dan tidak sanggup bekerja secara produktif, terutama di sektor Pendidikan dan Kesehatan melalui instrumen fiskal. Negara juga harus melakukan penguatan usaha ekonomi rakyat seperti pemberian subsidi, insentif pajak, serta pembuatan sarana dan prasarana yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti irigasi dan jalan.
4. Menjaga stabilitas serta terwujudnya pemerataan ekonomi nasional.

## B. Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia di era Society 5.0

Pada tahun 2019, rata-rata Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif berada di angka 5,89. Angka ini meningkat dari tahun ke tahun. Dari tiga pilar yang menjadi indikator ekonomi inklusif, pilar kedua dan ketiga yang mengalami peningkatan cukup baik (Bappenas, 2021). Pilar kedua adalah Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan sedangkan pilar ketiga adalah Perluasan Akses dan Kesempatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menekankan peningkatan kualitas SDM dengan memberikan perluasan akses, terutama akses pendidikan dan kesehatan agar pendapatan lebih merata dan terjadi pengurangan kemiskinan. Berikut adalah grafik evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2019.



Sumber: Bappenas, 2019

Gambar 7  
 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia Tahun 2011 s.d. 2019

Provinsi dengan indeks tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai 7,82 disusul Provinsi Bali dengan nilai cukup jauh, yaitu 6,77. Meskipun tertinggi, Provinsi DKI Jakarta belum termasuk ke dalam kategori memuaskan. Sedangkan Provinsi Papua berada di urutan terakhir dengan nilai 3,21. Terdapat 17 provinsi yang berada di bawah rata-rata Indonesia.

### PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pada tahun 2011, indeks pilar ini adalah 4,85 sedangkan di tahun 2019 bernilai 5,48. Pertumbuhan indeks di pilar 1 tidak signifikan pilar 2 dan 3. Bahkan untuk indeks pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2011 dengan nilai 4,44, tahun 2019 bernilai 4,32. Nilai ini mulai turun sejak 2014. Untuk indeks kesempatan kerja dan indeks infrastruktur terdapat peningkatan. Meski demikian, pencapaian pilar 1 ini sudah dalam kategori memuaskan meskipun masih terlalu jauh nilainya untuk mencapai kategori sangat memuaskan.

Tiga provinsi dengan indeks pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terbaik pada tahun 2019 adalah DKI Jakarta (8,21), Kepulauan Riau (6,37), dan DI Yogyakarta (5,94).

Sedangkan tiga provinsi dengan indeks terbawah adalah Papua (2,43), Nusa Tenggara Timur (4,09), dan Sulawesi Barat (4,46). Berikut adalah tabel mengenai pencapaian pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi.

Tabel 3  
Tabel Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia Tahun 2011 s.d. 2019

SKALA NASIONAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pertumbuhan Ekonomi (IPE)	4.44	4.48	4.46	4.38	4.37	4.38	4.36	4.37	4.32
Indeks Kesempatan Kerja (IKK)	4.83	5.27	5.45	5.45	5.68	6.10	6.10	5.66	6.03
Indeks Infrastruktur Ekonomi (IIE)	5.30	5.39	5.58	5.65	5.92	6.01	6.12	6.27	6.33
PILAR 1: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN	4.85	5.03	5.14	5.13	5.28	5.43	5.46	5.37	5.48

Sumber: Bappenas, 2020

Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pencapaian ekonomi inklusif adalah mengarusutamakan pembangunan infrastruktur. Anggaran sebesar Rp346,6triliun telah dikeluarkan pemerintah dalam APBN 2017. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Infrastruktur bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi karena membantu menciptakan konektivitas antardaerah dan mempermudah aktivitas perekonomian.

Penyediaan infrastruktur diharapkan mampu membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Selain itu, infrastruktur yang memadai bisa menjadi daya tarik investor sehingga pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah menganggarkan 2persen dari PDB untuk penelitian dan pengembangan ekonomi inklusif berbasis teknologi (Bappenas, 2019). Isu strategis dalam proses pencapaian Pilar 1 antara lain:

Tabel 4  
Isu Strategis Pencapaian Pilar 1

No.	Sub Pilar	Isu Strategis
1.	Infrastruktur Ekonomi	a. Akses listrik di daerah terpencil/tertinggal masih terbatas b. Infrastruktur telekomunikasi seluler di daerah belum merata c. Pemeliharaan jalan terkendala aturan yang kurang mendukung d. Pengawasan pengerjaan pembangunan jalan baru kurang optimal
2.	Kesempatan Kerja	a. Pengangguran usia muda tinggi b. Tingginya pekerja dengan upah c. Terjadinya <i>skill mismatch</i> antara pendidikan dengan industri
3.	Pertumbuhan Ekonomi	a. Iklim investasi yang belum kondusif b. Daya saing sektor industri yang masih rendah c. Efisiensi perbankan masih rendah

Sumber: Bappenas, 2019

## PILAR 2 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Selama Sembilan tahun terakhir, indeks ketimpangan dan indeks kemiskinan meningkat lebih dari satu poin. Secara nasional, nilai indeks ketimpangan meningkat dari 4,29 di tahun 2011 menjadi 5,41 di tahun 2019. Sedangkan indeks kemiskinan meningkat dari 6,65 di tahun 2011 menjadi 5,48 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan mulai menyempit.

Meski demikian, pencapaian pilar 2 ini sudah dalam kategori memuaskan meskipun masih terlalu jauh nilainya untuk mencapai kategori sangat memuaskan.

Adapun tiga provinsi terbaik dalam pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan adalah Kepulauan Bangka Belitung (8,27), Kalimantan Selatan (7,94), dan DKI Jakarta (7,82). Sedangkan tiga provinsi dengan indeks terendah adalah Papu (3,61), Papua Barat (5,02), dan Gorontalo (5,1). Berikut adalah tabel mengenai pencapaian dan isu strategis Pilar 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.

Tabel 5  
 Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011 s.d. 2019

SKALA NASIONAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Ketimpangan (IK1)	4.29	4.28	4.20	4.52	4.66	4.90	5.04	5.20	5.41
Indeks Kemiskinan (IK2)	6.65	6.34	6.36	6.56	6.70	6.99	7.88	7.93	7.98
PILAR 2: PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN	4.85	5.03	5.14	5.13	5.28	5.43	5.46	5.37	5.48

Sumber: Bappenas, 2020

Tabel 6  
 Isu Strategis Pencapaian Pilar 2

No.	Sub Pilar	Isu Strategis
1.	Ketimpangan	a. Pertumbuhan pendapatan penduduk 40% terbawahlambat b. Adanya diskriminasi upah terhadap perempuan c. Kesempatan kerja dan usaha di desa terbatas d. Tingkat Pendidikan dan keterampilan di desa lebihrendah
2.	Kemiskinan	a. Kemampuan pertumbuhan ekonomi dalammenurunkan kemiskinan masih rendah b. Kesadarab dan pemahaman masyarakat terhadappola gizi seimbang masih rendah c. Harga sumber protein hewani masih mahal

Sumber: Bappenas, 2019

### PILAR 3 : Perluasan Akses dan Kesempatan

Pilar ketiga merupakan pilar dengan peningkatan terbaik dibanding dua pilar lainnya. Indeks Kabalitas Manusia meningkat dari 4,17 di tahun 2011 menjadi 5,78 di tahun 2019. Indeks Infrastruktur Dasar meningkat dari 5,89 di tahun 2011 menjadi 7,85 di tahun 2019. Indeks Keuangan Inklusif juga meningkat dari 2,91 di tahun 2011 menjadi 4,99 di tahun 2019. Pencapaian pilar 3 ini sudah dalam kategori memuaskan meskipun masih terlalu jauh nilainya untuk mencapai kategori sangat memuaskan.

Berbeda dengan hasil pilar 1 dan 2, di indeks ekonomi inklusif di pilar 3, DKI Jakarta hanya berada di urutan ke-7 dengan nilai 7,11. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat DKI Jakarta belum merata. Tiga provinsi dengan nilai indeks terbaik adalah DI Yogyakarta (8,49), Bali (7,84), dan Jawa Timur (7,7). Adapun tiga provinsi terakhir dalam indeks ketiga adalah Papua (4,96), Banten (5,14), Maluku Utara (5,39). Berikut adalah tabel mengenai pencapaian dan isu strategis Pilar 3: Perluasan Akses dan Kesempatan.

Tabel 7  
Tabel Perluasan Akses dan Kesempatan di Indonesia Tahun 2011 s.d. 2019

SKALA NASIONAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kapabilitas Manusia (IKM)	4.17	4.41	5.18	5.51	5.87	6.32	5.60	5.54	5.78
Indeks Infrastruktur Dasar (IID)	5.89	6.10	6.52	6.71	7.03	7.19	7.38	7.66	7.85
Indeks Keuangan Inklusif (IKI)	2.91	3.03	3.54	3.82	4.02	4.44	4.79	4.87	4.99
PILAR 3: PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN	4.85	5.03	5.14	5.13	5.28	5.43	5.46	5.37	5.48

Sumber : Bappenas, 2020

Tabel 8  
Isu Strategis Pencapaian Pilar 3

No.	Sub Pilar	Isu Strategis
1.	Kapabilitas manusia	a. Akses mendapatkan pendidikan tinggi masih terbatas b. Fokus kebijakan kesehatan masih kepada upayakuratif c. Kepesertaan sektor informal dalam JKN masih rendah
2.	Infrastruktur dasar	a. Tata kelola air bersih yang belum baik b. Sumber air bersih terbatas c. Anggaran dan lahan untuk pembangunan fasilitas buang air besar sendiri terbatas d. Kesadaran masyarakat akan perilaku bebas buang air besar sembarangan masih kurang
3.	Keuangan inklusif	a. Pertambahan jumlah kantor layanan bank dan ATM melambat b. Akses UMKM terhadap kredit perbankan masih rendah

Sumber: Bappenas, 2019

## Pembahasan

### Peluang dan Tantangan Pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia di Era Society 5.0

Sejak tahun 2016, salah satu fokus pemerintah Indonesia adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini disusun sebagai pedoman langkah-langkah strategis bagi kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Perpres No. 82, 2016).

Sejauh ini belum ada program dari pemerintah yang secara tersurat membahas langkah strategis menghadapi Era Society 5.0. Meski demikian, sejak tahun 2018, Indonesia sudah menyusun roadmap Revolusi Industri 4.0 melalui program Making Indonesia 4.0. Era Society 5.0 sendiri merupakan penyempurnaan dari Revolusi Industri 4.0 sehingga sebelum menilai kesiapan Indonesia dalam menghadapi Society 5.0, pelaksanaan Making Indonesia 4.0 perlu dievaluasi perkembangannya.

Beberapa perkembangan yang muncul di era Society 5.0 antara lain kemajuan di bidang teknologi seperti robotika, mobile dan digital, pencetakan 3D, dan internet of things bisa

mengubah barang maupun layanan saat diproduksi, didistribusikan, dikirimkan, hingga dikonsumsi. Teknologi ini dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, seperti perawatan kesehatan, perancangan dan manajemen infrastruktur, pendidikan, inklusi keuangan, partisipasi masyarakat sipil, berbagai jenis pekerjaan baru, hingga akuntabilitas pemerintah. Letak geografis Indonesia yang didominasi lautan dan terpisah ke dalam puluhan ribu pulau tidak akan lagi menjadi penghalang. Bahkan memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kemampuan ekonomi.

Kemudahan tersebut belum tentu dapat dirasakan dalam waktu dekat secara merata karena ada beberapa tantangan dalam pencapaian Making Indonesia 4.0 dan kesiapan menghadapi Society 5.0. Salah satunya adalah infrastruktur yang masih belum merata, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jika infrastruktur tidak merata, tidak menutup kemungkinan kesenjangan akan semakin melebar di Indonesia dan pencapaian Ekonomi Inklusif bisa melambat pencapaiannya.

Tantangan berikutnya adalah kecepatan jumlah ahli teknologi belum sebanding dengan perkembangan teknologi baru. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pergeseran permintaan tenaga kerja. Akan ada beberapa pekerjaan yang hilang tetapi tidak sedikit muncul pekerjaan baru.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan karena saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk didominasi usia produktif. Hasil proyeksi penduduk BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 70,72% penduduk berada di usia produktif 15-64 tahun. Sedangkan persentase penduduk kategori lansia adalah 9,78%, baik 1,19% dibanding tahun 2010 (BPS, 2021). Jika masyarakat, terutama yang berusia produktif, tidak meningkatkan keterampilannya, kesenjangan bisa semakin melebar. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah tingkat pengangguran.

Tantangan lain yang dihadapi antara lain adalah masalah keamanan teknologi dan komunikasi komunikasi, keandalan stabilitas produksi, serta ketidakmampuan pemangku kepentingan untuk berubah. Oleh karena itu, Society 5.0 perlu dipersiapkan dengan baik oleh seluruh lini.

### **Penerapan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Strategi Percepatan Pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia di Era Society 5.0**

Hasil evaluasi pencapaian Ekonomi inklusif Indonesia serta peluang dan tantangan di Era Society 5.0 menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan demi tercapainya target Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa tentu harus menjadi dasar nilai agar setiap langkah yang dipilih selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Tabel 9

Penerapan Nilai-nilai Pancasila sebagai Strategi Percepatan Pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

<b>Pancasila</b>	<b>Strategi Percepatan berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila</b>
Sila ke-1	Melakukan sistem pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan negara yang bertolak belakang dengan nilai agama
Sila ke-2	Tidak adanya pemerasan maupun eksploitasi dalam pekerjaan.  Adanya peraturan dan pelaksanaan pemberian upah serta fasilitas pekerja yang adil sesuai dengan tingkat kinerja, tanggung jawab, serta risikonya.

Sila ke-3	Berkolaborasi dengan masyarakat dan perusahaan swasta untuk bersama-sama membangun negeri.
Sila ke-4	Mengutamakan hajat hidup orang banyak serta kehidupanekonomi rakyat.
Sila ke-5	Mengutamakan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.  Memperluas akses pendidikan baik formal maupun informal, terutama bidang-bidang yang dimungkinkan akan dibutuhkan di masa mendatang  Pemerataan akses kesehatan  Terbukanya kesempatan yang sama untuk mengakses Pendidikan dan pekerjaan, tanpa memandang gender.  Pemberdayaan bagi perempuan yang belum bekerja.

## Kesimpulan

Ketimpangan masih terjadi di Indonesia. persentase distribusi pengeluaran perkapita nasional masih didominasi oleh kelompok 20% pengeluaran tertinggi. Sedangkan kelompok 40% terendah mendapatkan kurang dari 20% share pengeluaran sejak 2005. Selain itu, distribusi PDB juga masih terfokus di Pulau Jawa dengan persentase 5% di tahun 2019.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mulai muncul untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Indikator-indikator yang digunakan dalam indeks ini telah sesuai dengan prinsip Sistem Ekonomi Pancasila. Adanya Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjalankan amanat Undang-undang dan Pancasila, yaitu berupaya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Ekonomi inklusif ini sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, setidaknya ada dua hal dasar yang perlu ditekankan untuk meningkatkan ekonomi inklusif, yaitu peningkatan kualitas SDM dan pemerataan infrastruktur.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dievaluasi pada penelitian ini dibatasi dari tahun 2011 hingga 2019. Berdasarkan hasil penelitian, data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa ketimpangan masih terjadi di Indonesia. Meski demikian, terjadi perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, indeks pilar 1 adalah 4,85 sedangkan di tahun 2019 bernilai 5,48. Untuk pilar kedua, secara nasional, nilai indeks ketimpangan meningkat dari 4,29 di tahun 2011 menjadi 5,41 di tahun 2019. Adapun pilar ketiga, secara nasional meningkat dari 4,85 menjadi 5,48. Ketiga pilar tersebut sudah dalam kategori memuaskan menurut Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia. Akan tetapi, perlu waktu yang tidak sebentar dan upaya yang tidak sedikit untuk mencapai kategori sangat memuaskan (skala 8-10).

Munculnya era Society 5.0 dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Teknologi dapat membantu mempercepat berkurangnya ketimpangan, terutama dalam hal aksesibilitas serta mulai muncul beberapa pekerjaan baru. Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, seperti perawatan kesehatan, perancangan dan manajemen infrastruktur, pendidikan, inklusi keuangan, partisipasi masyarakat sipil, hingga akuntabilitas pemerintah.

Adapun tantangan yang dihadapi antara lain infrastruktur yang belum merata, risiko bertambahnya pengangguran karena adanya pekerjaan yang sudah tidak diperlukan lagi dan jenis pekerjaan baru belum dikuasai, serta adanya bonus demografi di mana jumlah usia produktif Indonesia sebanyak 70% di antara seluruh penduduk.

Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk membantu mendorong percepatan pencapaian ekonomi inklusif. Sila pertama, melakukan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sila kedua, tidak terjadi pemerasan dan eksploitasi tenaga kerja serta terstandarisasinya pemberian upah bagi seluruh jenis pekerjaan. Sila ketiga, adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, serta perusahaan swasta untuk Bersama-sama memajukan Indonesia. Sila keempat, mengutamakan hajat hidup orang banyak dan ekonomi rakyat. Sila kelima, mengutamakan percepatan pembangunan infrastruktur, memperluas akses pendidikan, pemerataan akses kesehatan, terbukanya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan tanpa memandang gender, serta adanya pemberdayaan bagi para perempuan yang belum bekerja.

## Daftar Pustaka

- Acuña-Carvajal, F., Pinto-Tarazona, L., López-Ospina, H., Barros-Castro, R., Quezada, L., & Palacio, K. (2019). An integrated method to plan, structure and validate a business strategy using fuzzy DEMATEL and the balanced scorecard. *Expert Systems with Applications*, 122, 351–368. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.01.030>
- Assauri, S. (2013). *Strategic Management*. Rajawali Pers.
- Bappenas. (2019). *Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sebagai Indikator Kualitas Pembangunan Nasional dan Daerah*. April.
- Dyah Hapsari, S. A., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2018). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112. <https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.85-112>
- Ferreira, C. M., & Serpa, S. (2018). Society 5.0 and Social Development. *Preprints*, 1(November), 1–6. <https://doi.org/10.20944/preprints201811.0108.v1>
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society. *Japan SPOTLIGHT*, 27(August), 47–50. <http://www8.cao.go.jp/cstp/%0Ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=108487927&site=ehost-live>
- Kementerian Keuangan. (2020). Kerangka-Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Lena Ellitan | Lina Anatan. (2020). Achieving Business Continuity in Industrial 4.0 and Society 5.0. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 4(2), 235–239. <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd29954.pdf%0Ahttps://www.ijtsrd.com/management/business-policies-and-strategies/29954/achieving-business-continuity-in-industrial-40-and-society-50/lena-ellitan>
- Making Indonesia. (2019). *Making Indonesia*, 1–8. <https://doi.org/10.7591/9781501719370>
- Puspita, Y., Fitriani, Y., Astuti, S., & Novianti, S. (2020). Selamat Tinggal Revolusi Industri 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 122–130. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3794/3565>

- Shiroishi, Y., Uchiyama, K., & Suzuki, N. (2018). Society 5.0: For Human Security and Well-Being. *Computer*, 51(7), 91–95. <https://doi.org/10.1109/MC.2018.3011041>
- Swasono, S. E. (2010). *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neklasikal Sampai ke the End of Laissez Faire*. Perkumpulan Prakarsa.
- Tjakrawedaja, Subiakto; Soedarno, Soenarto; Lenggono, P. Setia; Purwandaya, Budhi; Karim, Muhamad; Agusalm, L. (2019). *Sistem Ekonomi Pancasila* (M. Zaelani (Ed.);2nd ed.). Rajawali Pers.
- Warsilah, H. (2015). *Pembangunan Inklusif sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah*.
- Wibisono, M. G., Purnama, A., & ... (2020). Indonesia’s Economic Development Policy As Implementation of Pancasila As the Identity of Indonesia. *Transformasi ...*, 80–92. <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/121>.
- World Economic Forum. (2018). The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights. *Report*, 26